



Parpol Terancam Tak Dapat Dana

■ BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan

” Kalau sampai akhir Januari 2016, Parpol tak menyerahkan hasil pertanggungjawaban itu, maka 2016 tidak mendapatkan bantuan dana Parpol. ”

PATRICE L SIHOMBING

Kasub Auditorat BPK RI Kalbar I

PONTIANAK, TRIBUN - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke Pemerintah Kalbar, Kubu Raya dan partai politik se-Kalbar. Penyerahan dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Kalbar, Jl A Yani Pontianak, Jumat (6/11).

Sayangnya, BPK RI tidak bisa membeberkan hasil LHP yang telah diserahkan ke pemerintah provinsi dan kabupaten serta Parpol kepada wartawan.

” Temuan pemeriksaan belum bisa dijelaskan karena

harus melihat LHP-nya dulu. Kita hanya soroti ada tiga aspek yaitu komitmen, sumber daya manusia dan aspek IT,” ujar Kepala Sub Auditorat BPK RI Kalbar I, Patrice L Sihombing.

Patrice menuturkan, hasil LHP memang masih ada beberapa kekurangan. Te-

tapi, ada juga beberapa hal positif yang sudah Pemprov dan Kubu Raya lakukan. ” Jadi kita tidak harus melihat jumlah LHP atau temuannya. Gambaran besarnya ada di tiga aspek itu sendiri,” katanya.

Terkait pertanggungjawaban dana Parpol, kata

Patrice, pihaknya sudah menyerahkan seluruh Parpol yang ada di Kalbar. ” Artinya dari seluruh Parpol yang ada sudah menyerahkan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya. Dari hasil pengeluaran dan pemenerima, itulah yang kita periksa. Namun masih ada kekurangannya, saat dilaporkan ke Pemda,” ujarnya.

Patrice menjelaskan, untuk 2016, apabila ada Parpol yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dananya, maka Parpol tersebut tidak akan diperiksa.

” Kalau sampai akhir Januari 2016, Parpol tak menyerahkan hasil pertanggungjawaban itu, maka 2016 tidak mendapatkan bantuan dana Parpol,” tegasnya.

Patrice menuturkan, pemeriksaan keuangan tahun depan sudah berubah maka ada perbedaan dari tahun sebelumnya. Ia mencontohkan, tahun ini pihaknya tak memberikan rekomendasi secara riil yang harus ditindaklanjuti.

” Tahun depan rekomendasi yang kita sampaikan harus ditindaklanjuti. Itu saja perbedaannya karena beda dari sifat pemeriksaannya. Kalau 2016 sama dengan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu dan lainnya,” ungkapnya.

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya menyatakan, dirinya belum melihat hasil LHP dari BPK. ” Tapi hasil dari pemaparan secara umum ada temuan positif. Artinya, ini kinerja nanti tindaklanjutnya kita akan bahas bersama. Karena memiliki waktu 60 hari setelah diserahkan,” jelasnya.

Wagub menegaskan, LHP ini akan segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang ada. Apalagi, kata Christiandy, Gubernur Kalbar Cornelis menginginkan seluruh jajaran mengelola keuangan secara serius.

” Kita memang masih ada kekurangan SDM dalam menindaklanjuti LHP itu. Kita tidak harus seramerta. Harus ada prosedur yang melibatkan BKD,” ucapnya.

Terkait dana Parpol, Wagub menyatakan ada badan pemerintah yang mengurusnya. ” Pastinya hasil paparan ada temuan positifnya. Pihak BPK sudah menegaskan, apabila dalam satu bulan setelah akhir anggaran Parpol tidak melaporkan, maka risikonya tahun depan tidak mendapatkan anggaran lagi,” ungkapnya. (rul)